

RIHLAH

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan

Manajemen Krisis Ramadah Umar bin Khattab Perspektif Sejarah Ekonomi Islam
Ardhina Nur Aflaha

Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979
Budi Sujati

Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Rahmawati

Menelusuri Potensi Obyek Wisata Sejarah Kota Makassar
Muhammad Arif

**Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'Dinging-Dinging di Desa Adat Tenro Selayar
(Perspektif Sejarah Lisan)**
Misbahuddin

Jurnal Sejarah dan
Kebudayaan Islam

Volume 7

No. 1

Juni 2019

Halaman 01-68

P-ISSN: 2339-0921
E-ISSN: 2580-5762

Diterbitkan oleh:

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar

RIHLAH

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan

Editor in Chief	: Dr. Rahmat, M.Pd.
Managing Editor	: Mastanning, S.Hum, M.Hum.
Editorial Board	: Nur Ahsan Syukur, S.Ag, M.Si. : Muh. Iqbal S.Hum, M.Hum. : Chaerul Munzir, S.Hum, M.Hum. : Lydia Megawati, S.Hum, M.Hum. : Muhammad Husni, S.Hum, M.Hum. : Zaenal Abidin, S.S., M.H.I. : Chusnul Chatimah Asmad, S.IP, M.M. : Muhammad Arif, S.Hum, M.Hum.
Desain Grafis	: Nur Arifin, S.IP.
Secretariat	: Safaruddin, S.Hum.
Reviewers	: Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag. : Dr. Hj Syamzan Syukur, M.Ag. : Dr. Nasruddin Ibrahim. : Dr. Abd. Rahman Hamid. : St. Junaeda, M.Hum. : Dr. Syamhari, M.Pd. : Dr. A. Sukri Samsuri, M.Pd.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Jln. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa Tlp. 0411-841879 Fax. 0411-822140 (Kampus II) E.Mail. rihlah@uin-alauddin.ac.id

Jurnal Rihlah terbit dua kali dalam setahun, bulan Juni dan bulan Desember berisi kajian tentang Sejarah dan Kebudayaan, baik dari hasil penelitian maupun tulisan ilmiah lainnya.

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik spasi 1.5 cm pada kertas berukuran A4 dengan tulisan berkisar 12-23 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi oleh Dewan Penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan konten tulisan.

Daftar Isi

Ardhina Nur Aflaha	1-12
<i>Manajemen Krisis Ramadah Umar bin Khattab Perspektif Sejarah Ekonomi Islam</i>	
Budi Sujati	13-29
<i>Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979</i>	
Rahmawati	30-42
<i>Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone</i>	
Muhammad Arif	43-52
<i>Menelusuri Potensi Obyek Wisata Sejarah Kota Makassar</i>	
Misbahuddin	53-68
<i>Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'dinging-Dinging di Desa Adat Tenro Selayar (Perspektif Sejarah Lisan)</i>	

RELASI DAN LEGITIMASI RAJA DENGAN ULAMA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI BONE

Rahmawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
email: rahmawati.harisa@yahoo.com

Abstract

This article discusses the relationship and legitimacy of the king as the highest authority of the kingdom with the *ulama* in the Islamic government system in the kingdom of bone. For clarity in this study, the author uses historical and anthropological studies as "scalpels" to find the desired information. The results of the study showed that between the king and the *ulama* indeed built a harmonious relationship, the king as the ruler of the region and the *ulama* as religious authorities. This was seen at least in two respects, namely: first the *ulama* as an advisor to the king in the government, second kinship ties through marriage. In addition, although the election of the king was built on the line of "*mangkau*" or original blood, "*to manurung*" the king as the holder of the highest legitimacy still coordinated with the *ulama* as an advisor for the election of a new king.

Keyword: Relations, Legitimacy, Ulama, Government and Kingdom of Bone

Abstrak

Artikel ini membahas tentang relasi dan legitimasi Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan dengan klien (ulama) dalam sistem pemerintahan Islam pada kerajaan Bone. Untuk mencapai titik terang dalam kajian ini, penulis menggunakan telaah historis dan antropologi sebagai pisau bedah dalam mencari informasi yang diinginkan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa antara raja dan ulama memang terbangun relasi dan harmonis antara raja sebagai penguasa wilayah dengan ulama sebagai otoritas keagamaan. Hal ini dapat dilihat sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, posisi ulama sebagai penasehat raja dalam pemerintahan. Kedua, hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Selain itu, meskipun pemilihan raja dibangun atas garis keturunan *mangkau* atau berdarah asli dari *to Manurung* raja sebagai pemegang legitimasi tertinggi tetap berkoordinasi dengan ulama sebagai penasehat dalam hal pemilihan raja baru.

Kata kunci: Relasi, Legitimasi, Patron Klien, Ulama, Pemerintahan dan Kerajaan Bone

A. Pendahuluan

Keberadaan seorang raja dalam sebuah wilayah adalah bagian dari ciri kehidupan sosial. Wilayah dan pemimpin (Raja) dua hal yang saling terkait, sehingga wilayah dan pemimpin (raja) dijadikan sebagai *central* untuk berkumpul dan menghimpun kelompok, baik formal maupun informal. Melalui posisi ini, Raja memperoleh wewenang untuk mengatur kehidupan sosial masyarakatnya.

Masalah utama dari persoalan kepemimpinan, relasi dan legitimasi terletak pada bagaimana cara seorang pemimpin memperoleh legitimasi atas kepemimpinannya serta bagaimana relasi antara Raja dengan masyarakatnya. Kuat ataupun lemah suatu legitimasi, tentu akan berpengaruh terhadap kelangsungan suatu kepemimpinan yang di jalankannya. Lemahnya legitimasi suatu kepemimpinan tentu akan berimplikasi buruk. Tanpa legitimasi yang kuat, posisi raja akan rapuh dan mudah untuk dijatuhkan. Untuk menjamin bertahannya sebuah legitimasi raja, adanya relasi yang baik antara ulama dan pemimpin dapat menghasilkan pemerintahan, serta struktur sosial yang baik. Untuk itu, ada peran klien dalam hal ini masyarakat. Namun lebih dari itu, klien yang dimaksud disini tidak hanya masyarakat, tetapi juga ulama guna mengatur tatanan hidup sosial dalam berbagai aspek meliputi hukum kerajaan, ekonomi, sosial, dan agama.

Dalam struktur kerajaan, Raja Bone berperan sebagai *Petta Mangkaue ri Bone* yang berarti “Tuanku yang berdaulat dan duduk di atas takhta” Kerajaan di Bone. *Mangkau* dalam Kerajaan Bone menduduki puncak piramid dalam struktur sosial kerajaan sehingga dapat dikatakan menempati posisi sentral dalam penyebaran Islam pada domain sosio politik kerajaan Bone. Pertautan geneologis ulama dan raja ini, dapat disebut sebagai relasi dan legitimasi.

B. Legitimasi dan Wewenang Raja dalam Kepemimpinan

Posisi Raja dalam struktur sosial berfungsi mengatur, dan menguasai rakyatnya dalam arti yang baik. Artinya untuk mendukung aspek tersebut Raja memiliki peran sentral dalam struktur sosial, atau dengan kata lain Raja harus memiliki bekal yang disebut dengan legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan atau persetujuan masyarakat dalam suatu wilayah atas posisi pemimpin. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Legitimasi adalah tahap yang harus dan miliki oleh setiap pemimpin, karena legitimasi tersebut akan mengantarkannya kepada wewenang penuh atas warga yang diperintahnya.¹ Pemberian wewenang dalam suatu kepemimpinan baik yang bercorak profan atau religius, politik dan nonpolitik pada umumnya diperoleh karena adanya legitimasi. Dengan legitimasi tersebut posisi pemimpin telah memiliki hak penuh atas masyarakatnya.

Perkembangan Islam di Bone tidak terlepas dari adanya legitimasi raja yang memiliki relasi dengan klien dalam hal ini ulama pada awal penerimaan Islam di

¹Selo Soemardjan dan Sulaiman Sumadi, *Setangkai Bunga Sosiologi*. (Yogyakarta: UI Press, 1964), h. 343.

Kerajaan Bone. Kedudukan raja yang merupakan tokoh pusat dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang mengenal pelapisan sosial yang tertutup, status seseorang menjadi sangat penting. Raja atau Mangkau dalam kerajaan Bone, menduduki puncak piramid dalam struktur sosial. Persyaratan utama untuk dilantik sebagai raja atau Mangkau adalah yang harus berasal dari keturunan bangsawan murni, yaitu keturunan langsung dari Tomanurung.

Seperti telah dikemukakan, Manurunge ri Matajang adalah seorang yang berasal dari kayangan (tempat dewata) yang turun ke bumi untuk memerintah di tanah kerajaan Bone. Kehadiran Tomanurunge dimaksudkan untuk bertindak sebagai penyelamat, menciptakan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. *Tomanurunge* dipercayai berasal dari Tuhan oleh sebab itu perintah dan larangannya tidak boleh dilanggar. Pelanggaran berarti akan menimbulkan kekacauan.

Oleh karena itu, kemurnian darah bangsawan bagi masyarakat Bone menjadi sesuatu yang sangat primer, karena Mangkau yang ideal adalah mereka yang berdarah bangsawan sejati. Untuk itu, pergantian Mangkau dilakukan berdasarkan keturunan. Begitulah seterusnya tahta Kerajaan Bone sejak *Manurunge* secara turun temurun diwarisi sehingga Raja Bone yang terakhir yaitu raja Bone yang ke-34 bernama Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinroe.

Sebagaimana dalam struktur pemerintahan Bone yang pertama memeluk Islam adalah La Tenriruwa bergelar Sultan Adam. Kendati pun, raja ini tidak terlalu berpengaruh karena baginda hanya menduduki tahta Kerajaan Bone selama tiga bulan yakni pada tahun 1611. Namun, jasa beliau tidak bisa dilupakan begitu saja, oleh karena atas sumbangsihnya berhasil membangun pondasi awal agama Islam ke dalam kerajaan dan juga terhadap masyarakatnya sehingga Islam semakin tersebar di kalangan masyarakat Bone hingga saat ini. Teori ini sesuai dengan doktrin “*an-nas ‘ala din al-Malik*”.² Doktrin seperti inilah yang mewarnai penyebaran Islam di kerajaan Bone. Dalam konsep politik ketatanegaraan Kerajaan Bone, raja mempunyai kedudukan yang amat tinggi, bahkan dipersonifikasikan dengan Dewa, yang sesuai dengan konsep *tomanurung* masyarakat Bone. Oleh kerana itu, jika dihubungkan dengan teori Azyumardi Azra mengenai penguasa dan rakyat, sekiranya berlaku pengkhianatan atau kedurhakaan kepada raja, ia akan dipandang sebagai salah satu dosa besar.³

Raja Bone ke 13 La Maddaremmeng dengan gelar Sultan Muhammad Saleh yang memerintah antara 1625-1640. Pada masa pemerintahannya dibentuk suatu jawatan yang dikenali sebagai “*Sara*” yang termasuk aspek “*panggadereng*”. Pada zaman pemerintahan La Maddaremmeng diangkat pula jawatan-jawatan *Sara*

²Abdul Rahman, *et. all, Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX*, (Edisi I. Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1992), h. 24.

³Azyumardi Azra, *Renaissance Islam di Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. (Bandung: Risda, 1999), h. 81-82

(*parewa sara*) yang terdiri dari orang-orang bangsawan yang mendapat gelar “*Petta*” seperti *Petta Kalie*, *Petta Imam*, *parewa syara* ini terdiri atas seorang qadhi untuk seluruh kerajaan, beberapa Imam, beberapa bilal, beberapa Mukim dan Amil sesuai dengan jumlah masjid yang ada di kerajaan. Para *parewa syara* ini mengatur urusan-urusan atau upacara-upacara keagamaan seperti maulid, *isra’ mi’raj*, *Id* di Istana raja.⁴

La Maddaremmeng sebagai Arungpone terkenal sebagai raja ketika itu, mengharapkan agar sikapnya itu diteladani pula oleh negeri-negeri tetangganya, seperti Soppeng, Wajo dan Aja’tappareng. Walaupun sikap yang dimaksudkan oleh La Maddaremmeng adalah perubahan sikap dan kepercayaan. Karena La Maddaremmeng adalah raja yang paling menyetujui penerapan syariat Islam yang kaffa, maka legitimasi yang ia lakukan dengan mengeluarkan perintah semua hamba sahaya “*ata*” yang tidak tergolong turun-temurun harus dimerdekakan atau dilayan sebagai pekerja yang memperoleh upah yang pantas. Perkara ini diceritakan dalam *Lontara* sebagai berikut:

*Ia memerintahkan kepada orang Bone supaya ia memerdekakan seluruh hamba (orang) yang dianggap selama dalam perang, begitu pula hamba sahaya yang dibeli, namun yang hanya bisa diperhamba kecuali hamba yang dipelihara dalam rumah saja. Sebagaimana yang dianggap keluarga yang taat pada pemerintah dan menjauhi yang dilarang.*⁵

Penjelasan di atas telah memberikan gambaran bahwa La Maddaremmeng melakukan perubahan yang besar di kerajaannya tanpa mengharap imbalan dari siapapun, karena usaha yang dilakukan murni karena Agama Islam. Namun, sangat disayangkan legitimasi yang ia buat mendapat respon buruk dari dalam kerajaan yang berujung pada peperangan. Yang paling menentang La Maddaremmeng adalah ibunya We Tenrisoloreng Makkalarue yang juga memerintah sebagai Datu di Pattiro.

Apa yang akan disebutkan disini selain dari keteguhan La Maddaremmeng yang menyebabkan tidak ragu menyebarkan dan melaksanakan ajaran Islam di dalam wilayah kerajaannya, yang menyebabkan dia bersedia membela kebijaksanaannya menghapuskan perbudakan dengan rela melakukan peperangan dengan ibunya sendiri. Meskipun dalam peperangan sengit dan panjang tersebut beliau berhasil ditumbangkan. Rahman Rahim menuturkan, setelah kekalahan tersebut, La Maddaremmeng ditangkap lalu di tawan dan diasingkan di Gowa

⁴Abdul Rahman, *et. all*, *Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX*, h. 246.

⁵*Ia’na mapparentangngi ri tau Bone pamaradekai sininna ata Rialae ri musue, kuaetopa ata ridoirie ia muata manue mennennungeng wedding mui Ri Puata anae ri agi lese Bolae. Padatosa si ajingnge iamani turusiwi parentana ritu maserroi manggelli. Lihat Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 372*

tepatnya di Desa Sanrangang.⁶ Adapun waktunya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 1644.⁷

Kedudukan dan posisi La Madaremmeng dalam elit kerajaan Bone A. Rahman Rahim mengemukakan bahwa:

La Madaremmeng sebagai Raja Bone ke-13 yang berusaha menghapuskan perbudakan sebagai salah satu pelaksanaan ajaran Islam yang dipeluknya dengan taat, harus diperangi oleh Gowa di bawah Sultan Malikussaid yang melanjutkan pimpinan Kerajaan Gowa, Sultan Alauddin, ayahnya yang telah menyampaikan Islam ke Bone. Pastilah bahwa tindakan Gowa itu bukan kerana hendak menumpas usaha pelaksanaan ajaran Islam. Gowa adalah pelopor pengislaman di negeri-negeri Bugis. Rupanya politik yang ikut main, yaitu usaha untuk menaklukkan Bone di bawah Gowa. Kalau ini yang menjadi sebabnya, maka kepeloporan tadi telah dikalahkan oleh kepentingan politik. La Madaremmeng telah melakukan suatu usaha yang utama...⁸

Melihat dari kegiatan raja-raja setelah menerima Islam di Kerajaan Bone tidak terlepas dari usaha usaha mereka selaku penguasa dalam kepemimpinannya. Namun dalam pelapisan sosial tetap membawa implikasi yang lebih jauh antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Raja tetap mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif yang dimiliki raja semakin menambah akumulasi kekuasaannya yang sekaligus berdampak pada kedudukannya sebagai penguasa tertinggi

Kekuasaan raja tersebut diatas juga boleh dilihat pada pemilikan sumber daya alam, seperti tanah dan sawah, bahwa masyarakat lapisan bawah hanya boleh memiliki sawah atau tanah yang tidak subur, sebagaimana juga dikemukakan oleh Bakkers di bawah ini:

Tanah, setidaknya sawah-sawah, sebahagian besar menjadi milik raja. Kerabatnya, *hadat*, para pangerang serta orang-orang penting, sawah-sawah yang dimiliki orang-orang kecil pada umumnya adalah yang paling jelek dan paling tidak produktif.⁹

Posisi raja yang menguasai sumber daya alam tersebut juga turut menopang dan memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin yang kharismatik. Raja atau Mangkau yang diyakini berasal dari keturunan Tomanurunge, dipandang oleh masyarakat selaku wakil Tuhan di bumi posisi yang demikian tinggi membuat orang selalu memberikan penghormatan dan ketaatan tertentu kepada rajanya. Hal ini

⁶Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. (Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2011), h. 135.

⁷Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 70.

⁸Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h. 165.

⁹Putra, *Musu' Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo*, dalam *Bingkisan Bunga Rampai Budaya No. 1*. Ujung Pandang: YKSS/Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1988), h. 131.

adalah lumrah pada masa yang di dalamnya belaku. Sebagaimana Th, Muller Kruger dan Noorduyn “*Coius region eius religio*” artinya, “siapa yang mempunyai negeri, dia punya agama”.¹⁰ Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa rakyat tunduk dan mengikuti agama yang dianut oleh rajanya.¹¹ Setelah Islam mengalami perkembangan di wilayah kerajaan Bone maka sedikit demi sedikit terjadi pergeseran bahwa sekarang ini yang dianggap penguasa tertinggi bukan lagi dari keturunan raja melainkan kekuasaan yang bersifat politik.

C. Relasi Ulama (*Qadhi*) dengan Raja dalam Pemerintahan Islam pada Kerajaan Bone

Usaha untuk mengungkap nama tokoh-tokoh atau ulama Islam mulai dari masa yang paling awal sejarah keberadaan Islam di Kerajaan Bone bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya, nama-nama ulama di Sulawesi Selatan yang paling awal yang bisa disebut adalah Syekh Yusuf al-Makassari (abad ke-17), ‘Abd al-Wahhab al-Bugisi (abad ke-18) dan ‘Abd al-Hafidz Bugis (abad ke-19[?]).

Kemungkinan ketiadaan sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan acuan dalam menelusuri proses transmisi pemikiran Islam di kalangan ulama Bugis-Makassar merupakan faktor utama munculnya kesulitan untuk mengungkap secara jelas proses transmisi tersebut. Selain itu kondisi sosio-politik daerah Bugis-Makassar, seperti halnya juga berbagai daerah di Indonesia yang sedang bergolak menyebabkan proses transmisi pemikiran Islam di kalangan ulama-ulama Bugis-Makassar ketika itu tidak berlangsung secara wajar. Akhir masa penjajahan Belanda yang dilanjutkan dengan penjajahan Jepang menyebabkan terjadinya kondisi sosial politik yang tidak mendukung usaha-usaha pembinaan kader-kader ulama. Hal itu disebabkan kerana seluruh potensi umat Islam lebih difokuskan pada usaha untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajahan bangsa-bangsa asing. Kerana itu, jika terdapat usaha untuk mendidik kader-kader ulama, hal itu hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenyataan ini tidak mendukung upaya pembinaan calon-calon ulama secara maksimal.

Islam sebagai agama yang diterima sebagai agama resmi kerajaan dibawah pemerintahan La Maddaremmeng. Adapun langkah awal yang dilakukan adalah mengangkat seorang hakim agama kerajaan yang disebut *Qadhi* yang bertanggung jawab mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat sekaligus sebagai penasihat raja. Selanjutnya, untuk lebih mengukuhkan pranata keIslaman, qadhi telah dimasukkan ke dalam lembaga atau kabinet pemerintahan. Namun sistem aturan baru tersebut tidak merombak secara total aturan yang berlaku sejak lama mereka bangun seperti *Pangngadereng* (sistem kebudayaan masyarakat), tetapi melengkapinya dengan memasukkan unsur-unsur Islami. Dengan demikian, pada zaman

¹⁰Th. Muller Kruger, *Sejarah Gereja di Indonesia*. (Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959), h. 20.

¹¹Noorduyn, *Sedjarah Agama Islam di Sulawesi Selatan*, dalam W.B. Sidjabat Noorduyn, J. (ed), *Panggilam Kita di Indonesia Dewasa Ini*. (Jakarta: Badan Penerbit Kritek, 1964), h. 87.

pemerintahan Raja La Maddaremmeng mengambil bentuk revolusi *monarki konstitusi* yang mendapat pengaruh Islam. La Maddaremmeng disebut sebagai pemimpin zaman revolusi ketiga sepanjang sejarah pemerintahan kerajaan di Bone.¹²

Dalam struktur pemerintahan tidak dilakukan perombakan, melainkan dilengkapi dengan memasukkan pranata atau lembaga Islam ke dalam struktur pemerintahan, seperti tugas Qadhi yang menangani urusan pengembangan dan pemantapan syariat Islam. Tugas Qadhi adalah memperdalam pengetahuannya dalam bidang syariat Islam dan syarat-syarat pengangkatan Qadhi pada masa itu didasarkan atas “*abhatireng*”, sama dengan keturunan, keilmuan atau keahlian di bidang hukum syariat. Sedang bisku tetap berada dalam lingkungan istana dengan tugas khusus menangani dan merawat benda-benda arajang di samping melaksanakan pengobatan tradisional. Disamping itu raja-raja mempergunakan nama-nama Islam dengan meletakkan gelaran Sultan didepan namanya. Setiap solat Jumaat dalam khutbah didoakan keselamatan raja dan kerajaan oleh khatib.¹³

Adapun posisi *Qadhi* dalam sistem pemerintahan pada Kerajaan Bone menempati posisi ketiga setelah *Jenneang* atau pengawas kerajaan. *Qadhi* bertugas sebagai penghulu syara dalam bidang keagamaan (Islam). Perangkatnya terdiri dari imam, khatib, dan bilal.

Sepanjang penelusuran penulis, tidak banyak informasi yang diterima mengenai ulama-ulama penyebar agama Islam sampai tahun 1900 M, mungkin ketiadaan sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan acuan dalam menelusuri proses transmisi pemikiran Islam di kalangan ulama Bugis-Makassar merupakan faktor utama munculnya kesulitan untuk mengungkap secara jelas proses transmisi tersebut. Namun satu hal yang dapat dipastikan bahawa yang berperan secara dominan di dalam perkembangan agama Islam tersebut adalah adanya “Pendidikan Islam” dalam wujud dakwah islamiyah ataupun pendidikan nonformal Islam lainnya.

¹²H. Sitanggang membagi perkembangan monarki ke dalam tiga sistem; 1) *Monarki absolute*, yaitu sistem kerajaan yang seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan raja. Pengaturan yang dilakukan oleh raja dengan sistem ini lebih bersifat keinginan sendiri dari pada menjalankan pemerintahan. Tidak ada aturan atau kekuasaan yang dapat membatasi kekuasaannya. 2) *Monarki parlementer* ialah bentuk pemerintahan kerajaan yang pelaksanaan kekuasaan tidak dipertanggungjawabkan kepada raja, tetapi kepada menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. Dalam sistem monarki parlemen, raja hanya bersifat simbol pemersatu atau simbol kebanggaan bersama atas nilai-nilai sejarah bangsa yang antara lain dikenal dengan istilah “raja tidak dapat berbuat salah.” 3) *Monarki konstitusi*, merupakan bentuk kelanjutan dari *monarki parlementer*. Dengan sistem ini, kekuasaan raja telah punya batas; segala sesuatu harus mengikuti ketentuan hukum. Raja hanya boleh berbuat apa yang diperbolehkan oleh hukum. Lihat H. Sitanggang, *Filsafat dan Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 133-136.

¹³Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), h. 385.

Peranan raja-raja Islam dalam mengembangkan syiar agama dan pendidikan Islam sangat besar khususnya di Kerajaan Bone. Ketika Kerajaan Bone diperintah oleh Raja ke-32 antara tahun 1905-1946 Andi Mappanyukki yang bergelar Sultan Ibrahim Matinroe ri Gowa, beliau melakukan berbagai usaha dalam pendidikan dan agama, diantaranya pada tahun 1929 di Watampone (kini ibu kota Kabupaten Bone) oleh pemuka masyarakat dan ulama Bone didirikan sebuah lembaga pendidikan Islam diberi nama Madrasah Amir al-Islamiyah. Istilah “amir” yang digunakan itu atas usul Syaikh Abdul Azis sebagai nama lembaga pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan atau penghargaan terhadap Raja Bone (*Amir*) yang pada masa itu dijabat oleh Andi Mappayukki yang atas restu beliaulah yang turut memprakarsai pendirian madrasah tersebut.¹⁴

Dalam kaitannya dengan madrasah Amiriyah Islamiyah Bone, ada baiknya dikemukakan juga pernyataan Haji Mahyuddin Syarif, beliau seorang mantan kepala sekolah di Bone. Dalam pernyataannya beliau mengemukakan bahwa:

Sekolah Amir Islam didirikan atas anjuran Raja Bone Andi Mappayukki, dimana sekolah tersebut, pada mulanya terletak di sebelah barat masjid tua Watampone, dengan kata lain Sekolah Amir Islam ini didirikan dalam lingkungan tanah Masjid Tua Watampone. Kini, sekolah Amir Islam sudah menempati tempat di jalan utama dan jalan menuju ke Kecamatan Awangpone. Sedang bentuk penamaannya sesuai dengan pemerintahan Islam yang disebut dengan perkataan Ammir, juga bisa digunakan kata Sultan, seperti halnya Andi Mappanyukki mempunyai gelaran Islam, yakni Sultan Ibrahim. Dengan demikian, untuk memajukan agama, maka raja Bone Andi Mappanyukki sudah berfikir jauh ke depan dengan jalan mendirikan lembaga pendidikan terutama pendidikan agama.¹⁵

Komitmen terhadap ajaran Islam diwujudkan dengan kepedulian menerapkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Bugis Bone. Selain itu juga diiringi dengan sikap keteladanan yang ditunjukkan, beliau dikenal sangat taat dalam menjalankan syariat Islam. Sumbangsih Andi Mappayukki terhadap pelaksanaan pengembangan Islam ditandai dengan inisiatifnya untuk mengadakan “Pertemuan Ulama Celebes Selatan” pada tahun 1934 di Watampone, ibu Kota Kerajaan Bone, musyawar itu diikuti oleh puluhan ulama terkemuka dari seluruh Sulawesi Selatan, termasuk hadir didalamnya Haji M. As’ad yang isinya untuk membicarakan cara-cara pengelolaan pendidikan Islam bagi masyarakat umum.¹⁶

Berkenaan dengan pendidikan agama tersebut memang telah disadari Raja Bone Andi Mappanyukki dengan beranggapan bahwa pendidikan adalah usaha utama dalam mengantar dan mewujudkan anak didik ke arah kedewasaan lahir batin.

¹⁴Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari Tradisional Hingga Modern*. (Yogyakarta: Graha Guru, 2005), h. 131

¹⁵H. Mahyuddin Syarif, Wawancara pada tanggal 25 september 2015 di Watampone.

¹⁶Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 18.

Ditambahkannya lagi bahawa kelangsungan hidup pendidikan dalam masyarakat, ditumbuhkan melalui dasar-dasar pendidikan budi pekerti dan mempertinggi rasa kemanusiaan. Konsep ini yang dipahami dan dirasakan oleh Raja Bone Andi Mappanyukki dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh kerana itu, pengembangan dalam pendidikan tidak cukup hanya pembinaan dalam lingkup keluarga saja, tetapi diperlukan sebuah pendidikan formal dalam rangka peningkatan wawasan pengetahuan bagi anak didik.

Konsepsi pendidikan Andi Mappanyukki memang memiliki pandangan jauh ke depan, kerana pemahaman beliau tentang pendidikan juga diungkapkan oleh pakar pendidikan modern dengan konteks yang sama. Salah satu diantaranya Sidi Gazalba yang menurutnya bahawa asasnya pendidikan dipandang dari sudut kebudayaan, terbagi atas tiga bahagian: (1) pendidikan keluarga atau rumah tangga sebagai lingkaran pendidikan yang utama, (2) pendidikan lembaga-lembaga formil sebagai lingkaran pendidikan kedua, (3) pendidikan masyarakat sebagai lingkaran pendidikan umum.¹⁷

Perpaduan yang harmonis antara ulama dan umara pada masa Andi Mappayukki membawa angin segar bagi penegakan perkembangan syariat Islam di Bone, pemerintah memberikan kemenangan pada ulama, dalam bidang keagamaan, sehingga keduanya mampu berjalan beriringan dengan semboyan, *Riappaketenningi Ade'e pattupui ri sara'e* artinya adat tempat berpegang dan *sara'* tempat saudaranya. Sejak masa itu peran ulama tidak hanya tergabung dalam organisasi qadhi, tetapi banyak di antara mereka melakukan aktivitas keagamaan di luar dari kordinasi organisasi formal. Para ulama lebih banyak memberikan pengajaran agama di masyarakat, termasuk yang dilakukan di tempat-tempat ibadah.

Para pengasuh Madrasah Amiriyah, selain dari ustaz yang berasal dari Bone sendiri, terdapat pula tenaga pengajar yang didatangkan dari luar, seperti 'Abd al-Aziz al-Hasyimi al-Murabi dari Makkah dan 'Abd al-Hamid dari Mesir. Menurut Mahmud Yunus, pada mulanya madrasah yang juga dikenal dengan nama Amir Islam School ini dipimpin oleh Ustadz 'Abd al-'Aziz al-Syimi al-Misri kemudian digantikan oleh Syaykh Mahmud 'Abd al-Jawwad al-Madani yang menjalankan tugas kepemimpinan madrasah yang dibebankan kepadanya sejak tahun 1935 sampai tahun 1948. Mata pelajaran yang diajarkan di sini tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu keislaman saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang digolongkan pengetahuan umum.¹⁸

Pada perkembangan berikutnya yakni pada tahun 1939, madrasah ini mendapat dukungan tenaga pengajar yang sengaja didatangkan dari Sumatra iaitu Ustadz Zainuddin Haji (alumni Normal Islam Padang), M. Arifin Jabbar (alumni HIK Jawa) dan Haji Darwis Amini yang tetap mengajar di madrasah ini hingga masa

¹⁷Sidi Gazalba, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1962), h. 89.

¹⁸Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara, 1995), h. 327.

pendudukan Jepun.¹⁹ Di samping itu, masjid-masjid menjadi tempat pengajian dan pendidikan agama yang rasmi dan ramai dikunjungi oleh penduduk untuk mendapatkan bimbingan keagamaan.

Sebagai maklum balas tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, pengelolaan madrasah ini ditingkatkan sesuai dengan kemajuan, di antaranya dengan mengganti nama menjadi Madrasah al-Amiriyah al-Islamiyah. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikannya, madrasah ini mendapat dukungan tenaga baru iaitu Syekh Mahmud al-Jawwad. Di tangan beliau, sistem pendidikan di madrasah ini diarahkan ke sistim klasikal seperti yang sudah dilaksanakan di MAI Wajo, di mana beliau pernah menghabiskan waktu selama beberapa tahun mengajar sebelum pindah ke Watampone. Hanya saja, lembaga pendidikan yang semula digagas oleh Raja Bone Andi Mappanyukki ini tidak berkembang seperti halnya dengan kemajuan yang dicapai oleh perguruan As'adiyah maupun DDI. Kerana itu popularitas Madrasah Amir al-Islamiyah ini jauh berada di bawah popularitas perguruan kedua lembaga pendidikan di atas. Meskipun demikian, haruslah diakui bahawa madrasah ini sebagai salah satu lembaga pengkaderan calon ulama yang telah berperan melahirkan beberapa orang ulama di kabupaten Bone seperti Abd. Aziz Palaguna.

Selain Madrasah Amir Islam, di Kota Watampone terdapat pula sebuah pesantren yang didirikan oleh K.H. Junaid Sulaiman bernama Ma'had Hadis (Arab: Ma'had al-Hadits). Pendiri lembaga pendidikan ini pernah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun di Makkah dan Madinah untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Berebeda dengan umumnya ulama-ulama Bugis-Makassar yang merupakan murid-murid K. H. Muhammad As'ad, K. H. Junaid Sulaiman bukanlah murid langsung K. H. Muhammad As'ad. Dalam mengelolah lembaga pendidikannya, K. H. Junaid Sulaiman memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Bone maupun dari Golongan Karya (Golkar) Bone. Para santri pesantren ini, selain mendapatkan pelajaran agama Islam, juga mendapatkan pelajaran umum. Sedang arah pembinaan yang ditekankan di sini adalah kemampuan untuk menghafal al-Quran. Hanya saja dalam perkembangannya kemudian, lembaga pendidikan Islam ini juga mengalami nasib yang tidak menggembirakan lantaran kurang memperoleh simpati masyarakat disebabkan oleh dukungan lembaga ini terhadap Golkar.²⁰

Meskipun lembaga pendidikan Islam ini masih berjalan sampai sekarang, nasib pesantren ini masih tidak menentu. Sejumlah pesantren di Sulawesi Selatan yang mengalami nasib yang sama adalah pesantren-pesantren yang pernah bernaung di bawah "bendera" Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), satu organisasi pendidikan Islam di bawah Golkar. Kenyataan ini menjadi bukti kuat yang mendukung kebenaran pandangan umum yang berkembang di masyarakat yang

¹⁹Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari Tradisional Hingga Modern*, h. 79.

²⁰Mattulada, *Islam di Sulawesi Selatan*, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983), h. 228.

mengatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial kemasyarakatan yang dikelola atas dasar kepentingan politik semasa akan mengalami nasib yang kurang menggembirakan jika tidak bubar dengan sendirinya.

Selain nama-nama ulama Bugis-Makassar yang telah dikemukakan di atas, masih terdapat sejumlah nama ulama Bugis-Makassar yang berperan melahirkan ulama atau kader ulama Bugis-Makassar, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Mereka yang masih hidup terus berkarya baik sebagai pendidik maupun sebagai mubaligh. Nama-nama ulama Bone yang sudah wafat namun tetap dikenang sebagai ulama Bugis yang berpengaruh adalah: Haji Husein bin Umar.²¹

Apabila nama-nama ulama yang dikemukakan di atas yang umumnya digolongkan sebagai ulama-ulama yang cenderung bersikap akomodatif terhadap pemahaman dan pengamalan Islam yang sudah mengakar dan melembaga secara turun-temurun di masyarakat Bone, maka perlu pula dikemukakan di sini barisan ulama yang dapat dikategorikan sebagai kelompok ulama “pembaharu” dalam pengertian memiliki kecenderungan untuk melakukan usaha pemurnian pemahaman serta pengamalan ajaran Islam yang mereka yakini telah tercemar oleh unsur-unsur non-Islam yang berbentuk *tahyul*, *khurafat* dan *bid'ah*. Di antara ulama yang bisa dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah Haji Abdullah, seorang penggagas berdirinya kelompok al-Sirat al-Mustaqim di Makassar pada tahun 1923 yang kemudian menjadi pencetus kepada kelahiran Muhammadiyah di kota tersebut.

Haji Abdullah adalah ulama Sulawesi Selatan yang pertama-tama menyatakan secara terbuka, bahwa kalau solat Jumat tidak ada solat Zuhur, pernyataannya itu menggemparkan kota Makassar, sehingga Kadhi Makassar, Maknun Daeng Marangka mengadukannya ke Pengadilan. Dalam pengadilan, hakim memutuskan Haji Abdullah bebas dari segala tuduhan. Maka semakin masyhurlah nama beliau keseluruh pelosok Sulawesi selatan termasuk di Bone.

Pada perkumpulan al-Sirat al-Mustaqim, Haji Abdullah menjadi ketua, beberapa orang ulama lainnya menjadi anggota pengurus, diantaranya Haji Abdul Razak, Muh. Said Daeng Massikki, Mansyur al Yamani, Haji Jakarah, Haji Nuhung, Haji Haba Tahir yang kemudian menjadi pelopor-pelopor gerakan Islam Muhammadiyah. Dalam bulan April 1926, atas inisiatif mansyur al-Yamani, seorang Arab pedagang batik dari Surabaya bersama Haji Abdullah, dimulailah prakarsa pembentukan organisasi Muhammadiyah, dan sejak saat itulah mulai muncul sejumlah ulama yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam yang bercorak puritanistik.

Dalam Persyarikatan Muhammadiyah, Haji Abdullah dan kawan-kawannya bekerja keras memberantas kemusyrikan, bidah, khurafat dan tahyul. Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah agama dan rumah-rumah pemeliharaan anak yatim. Diselenggarakan juga berbagai tabligh dan kegiatan dakwah

²¹Abu Hamid, *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 389.

di tempat-tempat umum, walaupun diawasi dengan keras oleh PID (Politik Inlictingen Dienst) dari Kepolisian Hindai Belanda.

Sejak awal gerakan Islam Muhammadiyah itu ditangani oleh haji Abdullah, beliau senantiasa memperoleh hamatan dari kaum adat dan kaum raja-raja. Pemerintah Zelfbestuur Bone umpamnya, dikenal amat keras menentang Muhammadiyah. Pemerintah Zelfbestuur Bone umpamnya, dikenal amat keras menentang Muhammadiyah. Berbagai aturan diadakan yang menghambat masuknya Muhammadiyah di daerah Zelfbestuur Bone. Akan tetapi ajaran Muhammadiyah itu lambat laun diterima juga oleh orang-orang terkemuka di Bone.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan cepatnya memperoleh tempat yang sangat mendorong kesadaran masyarakat yang lebih luas dan menerima pandangan-pandangan baru tentang Islam seperti yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama.

D. Kesimpulan

Raja Bone yang diangkat menjadi *mangkau* atau orang yang memiliki dara *tomanurung* merupakan sesuatu yang mesti melekat pada setiap calon raja. Dalam konsep politik ketatanegaraan pada Kerajaan Bone raja mempunyai kedudukan yang amat tinggi yang dimodifikasikan dengan Dewa sebagaimana yang tertanam dalam konsep *tomanurung*. Adapun ulama sebagai klien membentuk jawatan-jawatan keberagamaan seperti masjid, pendidikan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan keberagamaan. Jawatan-jawatan inilah yang berkembang dan bergerak menjadi suatu wadah baru dalam sistem pemerintahan Islam di Bone. Sistem pemerintahan tersebut melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang kental dengan nuansa agama Islam seperti madrasah Amir Islam School, Ma'had Hadis, lalu berkembang menjadi GUPPI atau gabungan usaha perbaikan pendidikan Islam. Dalam perkembangannya ulama mengembangkan manuvernya ke dalam sistem politik yang melahirkan gerakan Islam seperti muhammadiyah dan NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar., *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Azra, Azyumardi., *Renaissance Islam di Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Risda, 1999.
- Errington, Joseph., *Self and Self-Conduct the Javanese Priyai Elite*. American Ethnologist, Volume 11, 1977.
- Gazalba, Sidi., *Pendidikan Islam dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Antara, 1962.
- Getteng, Abd. Rahman., *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari Tradisional Hingga Modern*. Yogyakarta: Graha Guru, 2005.
- Hamid, Abu., *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

- Kruger, Th. Muller., *Sejarah Gereja di Indonesia*. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959.
- Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
- _____. *Islam di Sulawesi Selatan*, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983.
- _____. *Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Noorduyn, *Sedjarah Agama Islam di Sulawesi Selatan*, dalam W.B. Sidjabat Noorduyn, J. (ed), *Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Badan Penerbit Kritten, 1964.
- Putra., *Musu' Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo*, dalam *Bingkisan Bunga Rampai Budaya No. 1*. Ujung Pandang: YKSS/Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1988.
- Rahim, Rahman., *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2011), h. 135.
- Rahman, Abdul, *et. all, Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX*, Edisi I. Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1992.
- Soemardjan, Selo dan Sulaiman Sumadi., *Setangkai Bunga Sosiologi*. Yogyakarta: UI Press, 1964.
- Yunus, Mahmud., *Sejarah Pendidikan Islam di Idonesia*. Jakarta: Mutiara, 1995.